Pembangunan di Mentawai ; Siapa yang Mesti Disalahkan ?

Oleh : Erwin

Abstract

According to the government, the Mentawai ethnic group is classified as an isolated community needing "pembinaan" through introducing 'modern way of life'. Many development programs of various government institutions have been carried out to unveil its isolation. In this article, the writer analyses the success of this program in improving the Mentawainian well being. This article does not only intend to criticize the government intervention but also provides approaches that empower the Mentawai community based on its local potential and believe both its environment and culture.

1. Pendahuluan

Kepulauan Mentawai terletak sekitar 100 Km dari Kota Padang, disebelah Barat pulau Sumatera. Terdapat kurang lebih 40 buah pulau besar dan kecil, namun sebahagian besar penduduknya terkonsentrasi di empat pulau besar, yakni Pulau Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora dan Pulau Siberut. Luas Kepulauan Mentawai 6.546 Km2, kurang lebih 60 % dari luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Penduduk Kepulauan Mentawai berjumlah 53.365 Jiwa (Bapeda, 1990).

Pulau Siberut merupakan pulau terbesar dalam gugusan kepulauan Mentawai, dengan luas kurang lebih 4.772 Km2, dan berpenduduk 24.354 Jiwa (Sensus, 1990). Secara umum masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut masih jauh tertinggal dibandingkan dengan penduduk yang termasuk dalam wilayah administratif Propinsi Sumatera Barat. Menurut klarifikasi dari Departemen Sosial, masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut termasuk dalam katagori masyarakat terasing.

Penggolongan masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut sebagai masyarakat terasing, di dasarkan pada pola hidup dari masyarakatnya yang secara relatif masih berpindah-pindah, dan ketergantungan yang kuat terhadap ketersediaan dari sumber daya alam (Depsos, 1989). Dengan adanya kondisi tersebut, seyogianya program-program pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk merubah pola hidup dan ketergantungan yang kuat terhadap ketersediaan sumber daya alam.

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan, di dalamnya terkandung dimensi perubahan. Dalam konsep pembangunan perubahan mempunyai makna yang positif, yakni perubahan menuju kearah yang lebih baik. Pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, sebagaimana yang ditekankan dalam GBHN, secara implisit dalam konteks pembangunan mensyaratkan pemahaman terhadap manusia, dilihat sebagai sumber daya yang potensial dalam menggerakkan pembangunan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan nasional jangka panjang pertama, belum mencerminkan amanat dari GBHN tersebut.

Penajaman konsep pembangunan dari *community development* ke *community empowerment* pada dasarnya memerlukan sejumlah pra-syarat; Pertama, masyarakat dilihat bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif dalam menentukan, melaksanakan dan mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan mereka; Kedua, institusi lokal dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat, ditempatkan sebagai elemen utama dalam rangka mewujudkan apa yang yang menjadi kebutuhan dari masyarakat; Ketiga; adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sikap saling percaya. Pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi sosial budaya suatu masyarakat agar mereka dapat mengikuti kemajuan tampa harus mengorbankan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga tidak tercabut dari akar budaya mereka selama ini.

Dimensi manusia dan institusi sosial atau pranata sosial, kalau direduksi dapat dilihat sebagai modal sosial (*social capital*) dan merupakan pra-syarat bagi keberhasilan suatu proyek pembangunan. Robert D. Putnam (1993), menempatkan modal

sosial sebagai unsur utama dalam pembangunan suatu masyarakat. Modal sosial mengacu pada aspek-aspek utama dari organisasi sosial, seperti : kepercayaan *(trust)*, norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*), yang akan meningkatkan efisiensi pembangunan dalam suatu masyarakat melalui tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Kerja sama sukarela dan tingkat partisipasi yang selara dan adil (*equal participation*), akan lebih mudah terjadi dalam di dalam suatu komunitas yang memiliki aturan-aturan yang mengatur pertukaran timbal balik (*principle of reciprosity*). Dalam konteks pengelolaan sumber daya yang berbasis komunitas (*Community based resources management*), akan ditandai oleh adanya partisipasi yang tinggi dari para anggotanya yang mengacu pada institusi-institusi dan aturan-aturan yang disepakati dan dikembangkan secara bersama.

Dengan dasar itu untuk masa datang, pemerintah harus meninggalkan cara-cara lama yang memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan, karena secara nyata telah mengakibatkan banyak kerugian, baik secara material maupun secara immaterial. Pendekatan yang bersifat partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, akan memberikan banyak manfaat, baik secara lansung berkaitan dengan program, mapun secara tidak langsung dalam rangka pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi dari masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut , dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kehidupan ekonomi bersifat subsistensi, yang bersumber pada kegiatan-kegiatan seperti: berburu, meramu hasil hutan, menangkap ikan dan berladang.
2. Teknologi yang digunakan masih sederhana, akan tetapi tepat guna (*appropriate technology*) dalam mengolah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
3. Populasi penduduk relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayah. Hidup dalam satuan satuan rumah tangga (lalep), dan sebagian besar tinggal di pedalaman, terpisah satu sama lain, kecuali dibeberapa lokasi

Pemukiman Masyarakat Terasing (PMT)dan lokasi pemukiman yang difasilitasi oleh organisasi keagamaan.

4. Pengelompokkan sosial relatif kecil, tertutup dan homogen dan diikat oleh organisasi sosial yang bertumpu pada ikatan kekerabatan.

Makanan pokok dari masyarakat adalah sagu, talas dan pisang. Sumbert makanan pokok tersedia dalam jumlah yang cukup. Di perkirakan luas areal perladangan sagu yang diusahakan secara tradisional masyarakat 14.839 Ha. Sistem pertanian yang dikembangkan oleh masyarakat masih sangat sederhana, diperkirakan setiap keluarga inti hanya memerlukan sekitar 0,75 hektar sampai dengan 1 hektar lahan yang betul-betul di kelola dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Proses pembukaan lahan melalui penebangan, tidak melalui pembakaran. Pola pemanfaatn lahan, mula-mula ditanami tanaman keladi dan pisang. Kemudian apabila tingkat kesuburan tanah mulai berkurang, maka ladang-ladang tersebut akan ditanami tanaman buah-buahan, seperti durian, cengkeh dan kulit manis. Dengan demikian secara berangsur-angsur daerah hutan asli berubah menjadi hutan buatan.

Kegiatan-kegiatan ekonomi yang mendatangkan pendapatan, pada umumnya masih mengandalkan hasil hutan berupa manau dan rotan. Namun dalam beberapa tahun terakhir pengambilan manau dan rotan sudah mulai berkurang, karena semakin jauhnya lokasi pengambilan manau dan rotan dari pemukiman penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, di beberapa tempat mulai terlihat usaha-usaha budidaya tanaman yang berorientasi komersial pada masyarakat Mentawai, seperti budidaya tanaman Nilam. Khususnya di wilayah bagian utara Pulau Siberut, pola penanaman Nilam yang dilakukan oleh masyarakat, dikuatirkan akan mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini disebabkan karena, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya tanaman nilam dan pengetahuan dasar konservasi, dimana pada setiap penanaman tanaman nilam, masyarakat selalu membuka lahan baru, dan bekas lahan tanaman nilam ditinggalkan begitu saja sehingga berubah menjadi padang alang-alang.

3. Pembangunan di Mentawai

Ketertinggalan masyarakat mentawai di bidang ekonomi dan teknologi, serta diikuti oleh perasaan tidak berdaya dalam menghadapi para pendatang yang mempunyai kemampuan ekonomi, teknologi, pendidikan dan politik, serta berbagai cara hidup yang lebih maju seringkali terungkap dalam bentuk kecurigaan yang berlebihan dan penolakan terhadap orang luar, serta bersikap apatis terhadap segala bentuk program pembangunan. Seiring dengan itu tidak adanya kesiapan sosial budaya dari masyarakat Mentawai dalam menghadapi intensitas dan perluasan pergaulan dengan pihak luar, mengakibatkan mereka tidak mampu mengambil manfaat dari keterbukaan lingkungan dan kontak-kontak budaya yang mereka alami selama masa pembangunan.

Disamping itu juga, di lihat dari aspek ekonomi secara makro, nampaknya terdapat ketidak-seimbangan arus masuk dan arus keluar dari nilai barang-barang dan jasa. Produksi hasil hutan, dalam hal ini manau dan rotan yang mencapai kurang lebih 70 % dari total produksi propinsi Sumatera Barat, tidak diikuti oleh besarnya arus masuk barang dan jasa ke kepulauan Mentawai. Adanya kenyataan tersebut, semakin memposisikan masyakat Mentawai pada posisi yang tidak menguntungkan dalam kerangka perkembangan ekonomi regional. Kondisi tersebut, nampaknya perlu diusahakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terarah dan terencana dengan mempertimbangkan keseimbangan tatanan ekologis dan kelestarian keanekaragaman hayati dalam kawasan, akan tetapi secara ekonomis menguntungkan masyarakat.

Ada kesan program-program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut, belum dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan karakterisktik dari masyarakat serta apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat setempat. Kelangkaan sarana dan prasarana transportasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, rendahnya tingkat kesehatan dari masyarakat, yang ditandai dengan tingginya angka kematian anak (balita), dan sistem nilai budaya yang lerikat kuat pada sistem kepercayaan tradisional, seyogianya menjadi dasar dalam

penyusunan dan pelaksanaan program pada masyarakat, terutama oleh pihak pemerintah.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat mentawai, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari masyarakat. Departemen Sosial, melalui program pembinaan Masyarakat Terasing, Pemerintahan Daerah melalui program, IDT, P3DT dan Bangdes, Kehutanan dengan program konservasi alam terpadu, dan sejumlah instansi lainnya, sesuai dengan bidang masing-masing.

Dalam pelaksanaan program terlihat ada ketidaksiapan dari masyarakat untuk menerima dan melaksanakan program-program tersebut. Seringkali ketidaksiapan dari masyarakat, dinilai sebagai bentuk penolakan dan pada akhirnya dijadikan alasan sebagai penyebab kegagalan dari program. Jarang sekali dilakukan evaluasi oleh pihak pelaksana terhadap bentuk dari program dan bagaimana program dilaksanakan.

Adanya perbedaan antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan dari masyarakat, menjadi salah satu faktor penyebab, disamping sosialiasi dari program yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masalah waktu dan pencapaian terget yang bersifat kuantitatif sangat mewarnai pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari aktifitas pembangunan.

Kalau dilihat dari program yang dilakukan oleh Departemen Sosial, sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1999, telah dilakukan pembinaan di dua puluh dua (22) lokasi di Pulau Siberut; 9 lokasi di kecamatan Siberut Utara dan 13 lokasi di Kecamatan Siberut Selatan. Di dua puluh dua lokasi tersebut telah dibina dan sedang dibina kurang lebih berjumlah 7.956 jiwa, dengan 1832 kepala keluarga. Artinya masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut sudah hampir separuh (50 %) yang dibina oleh Departemen Sosial. Pertanyaannya adalah dari jumlah yang begitu besar sudah berapa persen masyarakat Mentawai, hasil binaan dari Departemen Sosial keluar dari keterasingan, dan sampai sejauh mana kualitas hidup atau tingkat kesejahteraan dari masyarakat Mentawai meningkat ?

Kehadiran Taman Nasional Siberut, dengan luas kawasan konservasi 190.500 Ha, memang sangat dilematis. Mengingat, sistem mata pencaharian masyarakat mentawai sebagian besar berladang dengan pola yang sederhana,

berorientasi pada pemanfaatan lahan yang cukup luas untuk diolah sebagai areal bersosok tanam bagi masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan yang yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam pengolahan lahan pertanian dan peternakan, maka program-program yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sistem mata pencaharian lama dan atau ketergantungan yang begitu kuat terhadap sumber daya yang ada di hutan te;ah dilakukan, agar keberadaan Taman Nasional Siberut dapat dipertahankan. Dengan dasar itu, program-program yang bertujuan untuk merubah sistem mata pencaharian dari masyarakat merupakan suatu hal yang mendesak dan menjadi prioritas bagi pihak pengelola Taman Nasional Siberut. Dari tiga puluh enam (36) buah dusun yang terdapat di daerah penyangga, sudah berapa buah dusun yang dibina oleh Taman Nasional Siberut, dalam rangka mengurangi tekanan masyarakat terhadap sumber daya hutan tyang ada dalam kawasan.

Sampai sekarang, masalah pokok dan mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat Mentawai, dan untuk merubah image yang berkembang di dalam masyarakat terhadap program-program pembangunan yang dilaksanakan : pertama, adalah bagaimana meningkatkan pembangunan infra struktur, seperti : sarana dan pra sarana transportasi, baik yang menghubungkan antara dusun-dusun yang ada di dalam pulau ke pusat-pusat Kegiatan ekonomi di Pulau Siberut, maupun antara pusat-pusat kegiatan ekonomi di Pulau Siberut dengan Daratan Sumatera. Kedua, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan air bersih yang sehat untuk semua masyarakat. Ketiga, program-program yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, usaha-usaha yang terencana dan sistematis dalam usaha meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dapat dimulai dari pekerjaan-pekerjaan yang telah biasa dilakukan. Pendekatan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan lansung memperkenalkan hal-hal yang baru pada masyarakat.

Sedikitnya program-program pembangunan yang diarahkan pada hal-hal yang telah dikemukakan di atas, telah mengakibatkan perubahan sosial berlansung secara lambat, dan

sekaligus juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program-program lainnya pada masyarakat Mentawai di Pulau Siberut.

5. Kesimpulan

Peranan pemerintah di dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat Mentawai untuk masa datang dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

1. Perlu dilaksanakan program-program yang bertujuan untuk membuka keterisolasian dari masyarakat, baik antar dusun atau desa di dalam pulau, maupun dengan daratan Sumatera (khususnya Kota Padang).
2. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta mempersiapkan tenaga pengajar yang berdedikasi tinggi dengan memberikan kompensasi yang cukup, sehingga tingkat kesejahteraan dari para guru meningkat.
3. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta mempersiapkan tenaga medis yang berdedikasi tinggi dan disertai dengan pemberian kompensasi yang cukup, sehingga memberi daya tarik bagi tenaga medis dalam menjalankan tugas.
4. Perlu dilakukan secara terencana pembukaan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat di beberapa tempat di Pulau Siberut. Rencana pembukaan pusat-pusat kegiatan ekonomi harus diintegrasikan dengan persiapan sarana dan para sarana transportasi dari Pulau Siberut ke daratan Sumatera.
5. Perlu adanya rencana yang strategis, ekonomi dan tidak mengganggu tatanan ekologis di Pulau Siberut, dalam rangka pemanfaatan lahan di Pulau Siberut, baik untuk perkebunan maupun untuk transmigrasi. ■■■

Daftar Pustaka :

Cernea, Michael M. (1988). *Mengutamakan Manusia Dalam Pembangunan*. UI Press, Jakarta.

Lubis, Zulkifli. (1999). *Pengembangan Modal Sosial Dalam Pembangunan*. Makalah Seminar Jubilium ke-30 Jurnal Antropologi, 6-8 Mei.

Person, Gerard. (1992). *From Sago to Rice : Change in Cultivation in Siberut Indonesia*, in Bush Base : Forest Farm : Culture, Environment and development, edited by Elizabeth Croll and David Parkin, Routledge, London and New York.